
STRATEGI PENGAMANAN LAUT NATUNA UTARA GUNA MENGHADAPI ANCAMAN KONFLIK DI LAUT CHINA SELATAN

Amrin Rosihan Hendrotomo^{1*}, Bangun P. Hutajulu², Gentio Harsono³
*1amrinrosh@yahoo.com, 2zulu97ph@gmail.com, 3g.harsono@gmail.com
¹²³Universitas Pertahanan,

* email penulis/koresponden: amrinrosh@yahoo.com

Abstrak. Penelitian ini membahas strategi pengamanan Laut Natuna Utara dalam menghadapi ancaman konflik militer dan nir militer di Laut China Selatan, yang berpotensi berdampak langsung pada kedaulatan wilayah NKRI. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya eskalasi ketegangan di Laut China Selatan akibat klaim tumpang tindih dan aktivitas militer negara-negara seperti China yang agresif membangun pangkalan militer, serta kehadiran militer Amerika Serikat dan sekutunya. Tujuannya adalah menganalisis ancaman tersebut, menilai gelar kekuatan TNI saat ini, dan merumuskan strategi pengamanan yang komprehensif, efektif, dan efisien. Pembahasannya meliputi identifikasi ancaman militer dan nir militer seperti *illegal fishing* dan pelanggaran wilayah oleh kapal asing, evaluasi posisi geografis Natuna yang strategis, serta pengeluaran kekuatan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU termasuk Satuan TNI Terintegrasi (STT) Natuna dan Kogabwilhan I. Disorot pula keterbatasan kemampuan operasional, dukungan logistik, dan fasilitas pangkalan yang masih minim. Kesimpulan menegaskan bahwa ancaman yang ada sangat memengaruhi kebijakan pertahanan, namun pembangunan dan gelar kekuatan TNI di Natuna belum optimal untuk memberikan *deterrence effect* efektif. Saran penting meliputi pengembangan Natuna sebagai pangkalan utama militer, peningkatan sinergi gelar operasi gabungan, modernisasi alutsista, pembinaan kemampuan TNI, serta peningkatan diplomasi militer untuk menjaga stabilitas kawasan.

Kata Kunci: Laut Natuna Utara, Konflik Laut China Selatan, Strategi Pengamanan, TNI, Gelar Kekuatan, Deterrence Effect, Diplomasi Militer.

Abstract. This thesis examines the security strategy for the North Natuna Sea in confronting military and non-military conflict threats in the South China Sea, which potentially have direct implications for the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). The research background is founded upon the escalating tensions in the South China Sea resulting from overlapping territorial claims and military activities of states such as China, which has aggressively constructed military bases, along with the military presence of the United States and its allies. The objective is to analyze these threats, assess the current deployment of Indonesian National Armed Forces (TNI), and formulate comprehensive, effective, and efficient security strategies. The discussion encompasses the identification of military and non-military threats such as *illegal fishing* and territorial violations by foreign vessels, evaluation of Natuna's strategic geographical position, and the deployment of Indonesian Army (TNI AD), Navy (TNI AL), and Air Force (TNI AU) forces, including the Integrated Joint Task Force Natuna (STT Natuna) and Regional Defense Command I (Kogabwilhan I). The study also highlights limitations in operational capabilities, logistical support, and inadequate base facilities. The conclusion affirms that existing threats significantly influence defense policy; however, the development and deployment of TNI forces in Natuna remain suboptimal in providing effective deterrence effects. Key recommendations include developing Natuna as a primary military base, enhancing synergy in joint operational deployment, modernizing defense equipment (alutsista), developing TNI capabilities, and strengthening military diplomacy to maintain regional stability.

Keywords: North Natuna Sea, South China Sea Conflict, Security Strategy, TNI (Indonesian National Armed Forces), Force Deployment, Deterrence Effect, Military Diplomacy.

1. Pendahuluan

Kedaulatan merupakan hal yang sangat fundamental bagi suatu negara. Kedaulatan menurut Jenik Radon (1995) mengungkapkan bahwa ajaran filosofis yang paling mengesankan tentang kedaulatan adalah bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu. Kekuasaan absolut atas wilayah tersebut menjadi dasar bagi pembentukan negara (Yustisia, 2012).

Namun demikian kekuasaan absolut menyangkut kedaulatan negara tersebut sering kali berhadapan dengan masalah perbatasan, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal yang menjadi pemicu terjadinya konflik antar negara adalah tumpang tindih klaim (*overlapping claim*) kepemilikan atas suatu daerah atau sengketa batas wilayah (*border disputes*) yang belum terselesaikan (diplomacy.state.gov, 2021). Tingginya potensi dari wilayah sengketa yang antara lain ditandai dengan posisi geografisnya yang strategis ataupun ketersediaan sumber daya alam yang melimpah di wilayah sengketa dihadapkan dengan tuntutan kepentingan geostrategi maupun kebutuhan dalam negeri terhadap sumber daya tersebut, mengakibatkan sulitnya penyelesaian konflik secara damai. Permasalahan ini menjadi sangat sensitif karena menyangkut kedaulatan negara. Benturan kepentingan ekonomi, politik, sosial dan pertahanan negara-negara yang bersengketa wilayah tersebut bila tidak ditangani dengan baik berpotensi menimbulkan konflik terbuka yang melibatkan kekuatan militer mereka maupun negara lain yang merasa kepentingan nasionalnya di atau lewat kawasan tersebut terganggu.

Laut China Selatan (LCS) merupakan salah satu wilayah yang paling rawan konflik di kawasan Indo-Asia-Pasifik sebagai dampak benturan kepentingan nasional baik Negara Pantai maupun negara lainnya. Laut China Selatan yang sejak berakhirnya Perang Dunia II tidak ada satupun negara yang menguasai atau mengendalikan, namun setelah 50 tahun kemudian, semua Negara Pantai di sekitarnya menyatakan klaim mereka (Hayton, B, 2014). Sengketa wilayah diakibatkan adanya tumpang tindihnya klaim kepemilikan oleh 6 negara pantai (*claimant states*) yakni China, Taiwan, Vietnam, Philippina, Malaysia dan Brunei Darussalam serta adanya kepentingan beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, India, Australia, Jepang, Korea dan Australia (<https://www.straight.com>, 2021). Konflik di Laut China Selatan bermula saat China secara sepihak mengklaim hampir semua wilayah Laut China Selatan sebagai bagian dari kedaulatan wilayahnya berdasarkan sejarah masa lalu yang kemudian diwujudkan dengan mengeluarkan peta pada tahun 1947 dengan disertai adanya Sembilan garis putus-putus atau yang lebih dikenal dengan *Nine Dash Line* dari daratan China hingga perairan Laut Natuna

Utara. Sikap China ini dipertegas kembali ketika hadir pada acara “workshop mengatasi potensi konflik Laut China Selatan” pada tahun 2009 dimana delegasi China membawa dan membagikan peta dengan tetap memasukkan *Nine Dash Line* di Laut China Selatan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya meskipun diprotes oleh semua negara peserta.

Bila disimak lebih dalam, Banyak faktor yang dianggap sebagai penyebab sengketa Laut China Selatan seperti tingginya kandungan kekayaan minyak bumi dan gas alam yang tersimpan di dasar Laut China Selatan, melimpahnya keragaman sumber hayati laut dan perikanan di kawasan tersebut, serta posisi Laut China Selatan yang sangat strategis sebagai jalur utama perdagangan dan distribusi minyak internasional. Sebuah penelitian pada tahun 1968 menyimpulkan bahwa di Laut China Selatan terdapat kandungan minyak bumi dan gas alam yang sangat melimpah. Data yang ada mengatakan bahwa di Kepulauan Spratly dan Paracel terdapat cadangan minyak bumi sebanyak 105 miliar barrel sedang di seluruh kawasan Laut China Selatan terdapat sedikitnya 213 miliar barrel (<http://www.globalsecurity.org>, 2021). Demikian pula kandungan gas alam di Laut China Selatan yang diyakini mencapai 190 triliun *feet* (Reed, D, 2014). Dalam hal kekayaan hayati, sumber daya perikanan di Laut China Selatan tercatat mencapai 10% kontribusi kebutuhan ikan global. Di samping itu, Laut China Selatan memiliki posisi yang strategis sebagai salah satu jalur perdagangan paling penting dunia (<https://climate-diplomacy.org>, 2021). Nilai ekonomi perdagangan yang melintasi Laut China Selatan mencapai USD 5,3 triliun per tahun (<https://www.panmaritime.net>, 2021). Laut China Selatan juga merupakan jalur utama distribusi minyak internasional. Jutaan barrel per hari atau lebih dari 50% crude oil dan triliunan kibik feet Gas Alam Cair diangkut melalui Laut China Selatan. Kekayaan alam yang melimpah dan posisi Laut China Selatan yang strategis akan menghasilkan keuntungan bagi negara yang menguasai dan mengendalikan. Hal ini mendasari kuatnya keinginan keenam *claimant states* khususnya China untuk menetapkan klaim wilayah, menguasai dan mempertahankannya dari klaim atau gangguan negara lain.

Berbagai upaya penyelesaian sengketa Laut China Selatan secara damai telah ditempuh namun belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Belum adanya kesepakatan yang mendasar antara negara-negara yang bersengketa dalam penyelesaian masalah tersebut serta terus berlangsungnya tindakan-tindakan provokatif yang dilakukan oleh beberapa negara yang bersengketa justru meningkatkan eskalasi ketegangan di kawasan tersebut. Terlebih bahwa sengketa Laut China Selatan telah melibatkan kontestasi 2 negara yang secara ekonomi dan militer sangat kuat (*great power*), yakni Amerika dan China. Perseteruan Amerika dan China kini semakin kritis dengan adanya 2 isu yang lain, Taiwan dan perdagangan (East Asian Strategic

Review, 2019). Amerika menganggap bahwa pembangunan besar-besaran kekuatan militer China dan agresifitasnya membangun pangkalan-pangkalan militer di pulau-pulau buatan di Laut China Selatan sebagai ancaman bagi stabilitas keamanan termasuk kepentingan Amerika di kawasan tersebut. Sebaliknya China menganggap campur tangan Amerika dalam isu Laut China Selatan dan isu Taiwan sebagai ancaman terbesar kedaulatan wilayahnya. Perkembangan terkini menunjukkan peningkatan intensitas kehadiran kapal-kapal kombatan Amerika yang diikuti sekutu-sekutunya (Inggris, Perancis dan Jerman) dengan mengirim Gugus Tugas Tempur Kapal Induk hingga kapal selam nuklir untuk melaksanakan *Freedom of Navigation Operations* (FONOPS) sekaligus sebagai bentuk penyangkalan terhadap klaim sepihak China atas Laut China Selatan. China merespon dengan mengirim Gugus Tugas Laut yang terdiri dari kapal induk, kapal-kapal *destroyer* serta mengerahkan pesawat *fighter* dan *bomber* baik untuk melaksanakan operasi pengusiran maupun untuk latihan tempur yang juga melibatkan penggunaan peluru-peluru kendali strategis dalam rangka *show of force* kesiapan dan kuantan China dalam melindungi wilayah maritimnya. Tindakan kedua pihak yang berseberangan tersebut justru meningkatkan eskalasi di Kawasan yang bukan tidak mungkin berpotensi menjadi konflik militer.

Indonesia yang sejak semula tidak ikut mengklaim wilayah Laut China Selatan (*Non-claimant State*) pada akhirnya “ikut terusik” ketika mengetahui bahwa klaim *nine dash line* China tidak hanya fokus kepada Kepulauan Spratly dan Paracel, namun juga sebagian perairan Zona Ekonomi eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen (LK) Indonesia di utara Natuna. Masuknya ZEE dan LK Indonesia ke dalam permasalahan sengketa Laut China Selatan membawa konsekuensi adanya ancaman potensial bahwa bilamana konflik militer terjadi di Laut China Selatan, pasti akan berdampak langsung terhadap Indonesia, baik stabilitas keamanan, kepentingan nasional maupun kedaulatan wilayah (<https://www.cnnindonesia.com>, 2019). Beberapa peristiwa pelanggaran wilayah oleh kapal-kapal China baik kapal perang maupun kapal *coast guard* yang mengawal kapal-kapal ikan beroperasi di ZEE Indonesia yang diklaim sebagai daerah penangkapan ikan tradisional China atau kapal-kapal survey China yang melaksanakan survey laut hingga di selatan garis LK Indonesia, menambah dinamika ancaman keamanan di wilayah Laut Natuna Utara. Pemerintah China bahkan sejak tanggal 22 januari 2021 mengesahkan Undang-Undang yang mengizinkan kapal *coast guard* China menembak kapal asing yang untuk menjaga kedaulatan dan keamanan China serta untuk menjaga hak maritimnya ((<https://www.cnnindonesia.com>, 2019). Kebijakan baru China ini semakin memanasakan situasi keamanan di Laut China Selatan terutama jika dikaitkan dengan adanya

klaim wilayah oleh keenam *claimant states* yang tumpang tindih terhadap klaim wilayah China. Kebijakan penggunaan senjata di kapal *coast guard* China tersebut juga merupakan ancaman bagi Indonesia yang memiliki kepentingan terhadap keamanan Laut Natuna Utara. Kehadiran kapal perang dan kapal pemerintah asing serta kebijakan penggunaan senjata oleh kapal *coast guard* asing ini menuntut respon TNI sebagai komponen utama pertahanan negara untuk bersama pemerintah dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya melaksanakan penyesuaian strategi pengamanan wilayah Laut Natuna Utara sebagai antisipasi terhadap perkembangan lingkungan strategis di Laut China Selatan yang berpotensi menjadi ajang konflik militer.

Peningkatan eskalasi yang berpotensi menjadi konflik militer di Laut China Selatan, jika dikaitkan dengan terus terjadinya pelanggaran wilayah dan berbagai kegiatan ilegal di Laut Natuna Utara di tengah berbagai upaya Indonesia khususnya TNI untuk mengamankan perairan tersebut menunjukkan bahwa berbagai upaya yang sudah ditempuh atau dapat disebut sebagai “strategi” dalam pengamanan Laut Natuna Utara yang telah diterapkan saat ini tidak efektif . Untuk itu perlu disusun suatu upaya bagaimana menyusun sebuah strategi yang komprehensif dalam pengamanan Laut Natuna Utara yang sekaligus cukup efektif dan efisien dalam menghadapi ancaman konflik militer yang terjadi di kawasan Laut China Selatan.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Strategi. Arthur Lykke, seorang pakar strategi militer yang mengembangkan konsep kerangka strategi meliputi ends, ways, dan means. Bagi Lykke, strategi merupakan suatu ekspresi koheren dari suatu proses yang mengidentifikasikan ends (tujuan), ways (cara) dan means (sumber daya). Ends merupakan tujuan atau hasil yang diinginkan dari strategi yang dilakukan. Istilah end-state identik dengan akhir dari tujuan strategi. Ways adalah tindakan atau metode dan proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan Means adalah seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan metode dan proses tersebut. Lykke menyatakan pentingnya untuk menyeimbangkan Ends, Ways, dan Means, yang disamakannya dengan tiga pondasi dari strategi.

Teori Pembangunan Kekuatan Militer. Menurut P.H Liotta dan Richmond M. Lloyd (2005) dalam bukunya yang berjudul “The strategy And Force Planning Framework”, dalam kerangka kerja pembangunan kekuatan, strategi keamanan nasional berada pada strata di bawah kepentingan nasional, dimana strata pertama adalah tujuan nasional, bila diurutkan secara berturut-turut adalah: (1) Kepentingan Nasional, (2) Tujuan Nasional dan (3) Strategi keamanan nasional. Setelah kepentingan nasional, bagian berikutnya yang penting untuk diperhatikan

dalam pembangunan kekuatan adalah keterbatasan sumber daya, ancaman, tantangan, kerawanan dan kesempatan. Sementara itu, Richmond M. Lyod and Dinn A. Lorenzini (1981) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan kekuatan militer merupakan suatu proses revolusioner serta dilaksanakan secara berulang. Kondisi perkembangan lingkungan strategis di kawasan LNU dan LCS saat ini sangat penting untuk diperhatikan dan menjadi salah satu pokok persoalan yang menentukan dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan TNI serta menjadi bahan kajian dalam penelitian ini, mengingat bahwa pembangunan dan pengembangan kekuatan dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Teori Sea Power. *Sea Power* mengandung pengertian bagaimana sebuah negara meningkatkan kekuatan militernya di laut, yang diukur dengan kapasitasnya dalam memanfaatkan laut untuk mengalahkan musuh atau pesaingnya, yang mencakup berbagai unsur meliputi kapal-kapal kombatan, persenjataan, kapal-kapal bantu, pangkalan, personel terlatih dan pelayaran niaga (www.britannica.com, 2021). Teori tentang *Sea Power* yang cukup terkenal di lingkungan militer dunia adalah yang dikemukakan oleh Alfred Thayer Mahan (1840-1914), seorang ahli strategi Amerika, dalam bukunya “*The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783*”. Mahan menekankan pentingnya kekuatan laut (*sea power*) dengan berargumen bahwa kemakmuran dan kekuatan suatu negara tergantung pada pengendalian jalur laut internasional dan untuk menjadi bangsa yang besar harus dapat menguasai kepentingan-kepentingannya di laut (Mahan, A.T, 1987). Dalam bukunya tersebut, Mahan menuliskan bahwa “*Whoever rules the waves rules the world.*” Inilah yang sejak dulu telah menginspirasi banyak negara untuk membangun kekuatan Angkatan Lautnya secara besar-besaran (*naval build-up*) untuk melindungi negara dan *national interest*nya.

Teori Pengendalian Laut (Sea Control). Sir Julian S. Corbett Pada bukunya yang berjudul “*Some Principle of Maritime Strategy*” bahwa tujuan dari perang laut adalah penguasaan laut (*Command of the Sea*) dalam bentuk pengendalian laut (*Sea Control*) dengan metodenya yang terkenal, yaitu *Securing Command*, jika kekuatan sendiri lebih besar dari kekuatan lawan; *Disputing Command*, jika kekuatan sendiri tidak cukup untuk menjamin dilaksanakannya pengendalian mutlak, dengan cara mengulur ulur waktu dengan jalan diplomasi serta *Exercising Command*, bertujuan untuk mengendalikan jalur jalur perhubungan laut dalam rangka menjaga stabilitas keamanan suatu wilayah (Julian S. Corbett, 1911). Pengendalian laut yang dimaksud adalah kemampuan penguasaan laut pada ruang dan waktu tertentu untuk bergerak melintasi laut tanpa gangguan atau perlawanan yang berarti dan kemampuan untuk mencegah lawan melakukan gerakan tersebut. Dalam konteks tujuan strategi yang diharapkan

adalah mampu melaksanakan pendeteksian, pengenalan dan penilaian terhadap kontak yang melintas sehingga dapat memberikan respon yang sesuai yakni dalam bentuk pengejaran, penangkapan dan penyelidikan terhadap kontak yang dicurigai (Santacroce, 2012)

Teori Kampanye Militer. Kampanye Militer merupakan rangkaian dari beberapa operasi gabungan dan operasi lainnya yang dilaksanakan secara berurutan, serentak dan kombinasi keduanya untuk mencapai tugas pokok yang telah ditentukan oleh Komando Atas melalui tahapan kegiatan perencanaan untuk menentukan suatu keputusan melalui pengambilan keputusan militer/PPKM atau yang disebut dengan proses Biltus. Dalam ilmu militer, kampanye militer adalah istilah yang digunakan untuk rencana strategi militer yang penting, berdurasi panjang dan dalam skala yang besar. Istilah ini berasal dari kata *Campania* yang merupakan tempat operasi perang tahunan oleh tentara Republik Romawi.

Pada Undang Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, disebutkan bahwa Tugas Pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas tersebut diselenggarakan dalam bentuk Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Operasi Militer Perang termasuk didalamnya Kampanye Militer, Operasi Gabungan TNI, Operasi Darat, Operasi Laut, Operasi Udara, dan Operasi Bantuan. Sedangkan Operasi Militer Selain Perang meliputi operasi mengatasi gerakan separatis bersenjata, operasi mengatasi pemberontakan bersenjata, operasi mengatasi aksi terorisme, operasi mengamankan wilayah perbatasan, operasi mengamankan objek vital nasional bersifat strategis, operasi penanganan narkoba dan operasi siber, operasi perdamaian dunia sesuai kebijakan politik luar negeri, dan berbagai operasi non-tempur lainnya.

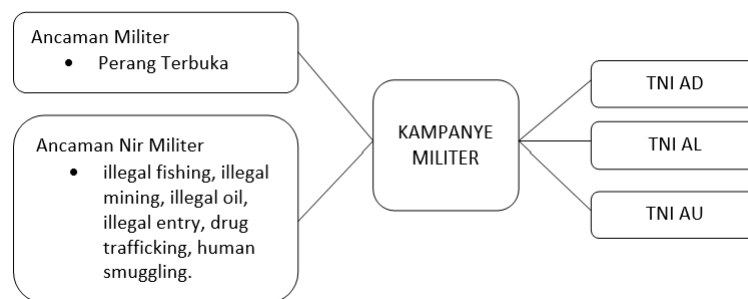
3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sasaran atau objek penelitian adalah Strategi pengembangan kekuatan militer di Laut Natuna Utara yang merupakan operasi militer dan terkait Kampanye Militer. Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lain.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Ancaman keamanan yang dapat menimbulkan konflik, baik militer maupun nir militer di Laut China Selatan

Secara teoritik, kampanye militer dapat dijelaskan sebagai rangkaian dari beberapa operasi gabungan dan operasi lainnya yang dilaksanakan secara berurutan, serentak dan kombinasi keduanya untuk mencapai tugas pokok yang telah ditentukan oleh Komando Atas melalui tahapan kegiatan perencanaan untuk menentukan suatu keputusan melalui pengambilan keputusan militer/PPKM atau yang disebut dengan proses Biltus. Jika dihadapkan pada Ancaman keamanan yang dapat menimbulkan konflik, baik militer maupun nir militer di Laut China Selatan maka kedua bentuk ancaman militer dan nir militer yang terdapat di Laut Natuna Utara sebagai dampak dari pusran konflik Laut China Selatan akan sangat berpengaruh kepada kebijakan pertahanan Indonesia khususnya kampanye militer Indonesia. Konsep ancaman tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kampanye Militer Indonesia Dihadapkan pada Potensi Konflik Laut China Selatan

Sumber: data diolah peneliti (2024)

Pembahasan mengenai ancaman keamanan yang dapat menimbulkan konflik militer maupun non-militer di Laut China Selatan menetapkan bahwa kampanye militer merupakan rangkaian operasi gabungan dan operasi-operasi lain yang dilaksanakan berurutan maupun serentak untuk mencapai tugas pokok yang telah ditentukan oleh Komando Atas melalui perencanaan dan pengambilan keputusan militer yang dikenal dengan proses Biltus. Dalam konteks ini, ancaman militer dan non-militer yang terjadi di Laut Natuna Utara sebagai dampak konflik di Laut China Selatan sangat mempengaruhi kebijakan pertahanan Indonesia, khususnya dalam penyusunan kampanye militer. Ancaman militer terutama berasal dari potensi perang terbuka akibat agresivitas negara-negara yang bersengketa, terutama China yang membangun pangkalan militer di pulau-pulau dan karang di Laut China Selatan serta kehadiran militer

Amerika Serikat dan sekutunya, yang berpotensi menimbulkan eskalasi konflik militer secara luas.

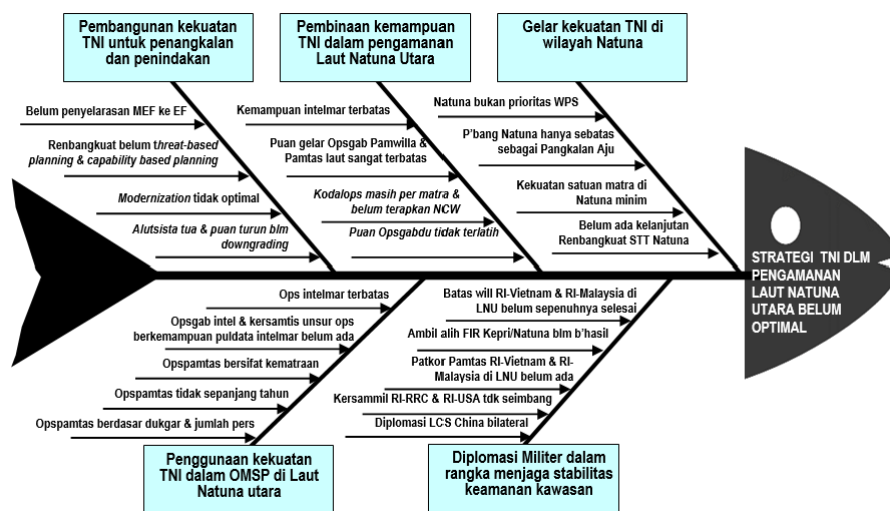
Selain itu, ancaman non-militer yang berkembang secara dinamis dan multidimensi meliputi illegal fishing, illegal mining, illegal oil drilling, illegal entry, drug trafficking, dan human smuggling. Ancaman-ancaman ini turut menimbulkan konflik sosial dan ekonomi yang juga memerlukan perhatian dan penanganan dari angkatan bersenjata dan instansi keamanan. Dampak dari kedua jenis ancaman tersebut memaksa kebijakan pertahanan Indonesia untuk mengembangkan strategi kampanye yang komprehensif dan adaptif, yang mencakup operasi gabungan lintas matra dan koordinasi dengan lembaga non-militer guna menghadapi segala bentuk ancaman secara efektif di Laut Natuna Utara. Gambar 4.1 dalam dokumen mengilustrasikan hubungan kompleks antara ancaman keamanan di Laut China Selatan dan respons kampanye militer Indonesia sebagai upaya menjaga kedaulatan dan stabilitas regional di kawasan tersebut. Strategi ini menjadi sangat penting mengingat posisi strategis Natuna yang berbatasan langsung dengan wilayah sengketa yang rawan konflik

4.2 Gelar kekuatan TNI saat ini dalam menghadapi ancaman keamanan di Laut China Selatan

TNI telah menempuh berbagai upaya untuk pengamanan Laut Natuna Utara mulai dari gelar operasi, gelar pangkalan hingga pembentukan Satuan TNI Terintegrasi (STT) di Natuna, dengan tujuan mewujudkan keamanan wilayah maritim, dirgantara dan daratan sekaligus mengantisipasi potensi konflik Laut China Selatan. Jika dilihat lebih dalam, ketiga elemen upaya penanganan oleh TNI tersebut merupakan sebuah strategi sebagaimana Teori Strategi yang disampaikan Artur Lykke, bahwa strategi merupakan suatu ekspresi koheren dari suatu proses yang mengidentifikasi *ends* (tujuan), *ways* (cara) dan *means* (sumber daya). Disini, gelar operasi dan gelar satuan di wilayah Natuna merupakan cara (*ways*), Alutsista, Pangkalan dan Satuan merupakan sarana atau sumber daya (*means*) sedangkan “menetralisir” ancaman dan mewujudkan keamanan Laut Natuna Utara adalah tujuan (*ends*).

Berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, dapat diketahui unsur-unsur yang menjadi kendala dalam strategi pengamanan Laut Natuna Utara. Terkait hal ini dibutuhkan analisis terhadap penggunaan Teori Strategi yang dikemukakan oleh Arthur Lykke, juga Teori Perencanaan Pembangunan Kekuatan *Force Planning Approaches* oleh Henry C. Bartlett, Teori *Sea Power* yang disampaikan oleh Alfred Thayer Mahan dan teori *Air Power* oleh Bernard Law Montgomery, teori *Sea Control* yang dibuat oleh Sir Julian S. Corbett

dan Milan Vego serta Teori Diplomasi yang dikemukakan oleh Erik Pajtinka. Analisis tersebut menggunakan teori *Fishbone* atau Diagram *Fishbone* yang dibuat oleh Ishikawa melalui empat langkah yaitu menetapkan pernyataan masalah-masalah utama yang dihadapi, mengidentifikasi kategori-kategori, menentukan masalah potensial melalui *brainstorming*, serta mengkaji dan menyepakati masalah yang paling mungkin terhadap 5 aspek strategi pengamanan yaitu pembangunan kekuatan, pembinaan kemampuan, gelar kekuatan, penggunaan kekuatan dan diplomasi militer, dengan kondisi saat ini sebagai berikut:



Gambar 1. Strategi TNI Dihadapkan pada Potensi Konflik Laut China Selatan

Sumber: data diolah peneliti (2024)

a. Pembangunan Kekuatan TNI.

Berdasarkan teori *Force Planning Approaches* Henry C. Bartlett bahwa terdapat beberapa aspek dalam perencanaan pembangunan kekuatan militer atau yang dikenal sebagai *the four pillars of total combat capability* meliputi *Readiness* (Kesiapan) personel dan alutsista, *Sustainability* (Ketahananlamaan) keberadaan dukungan logistik seperti amonisi, suku cadang, BBM, perbekalan dan sebagainya, *Modernization* (modernisasi) tingkat kecanggihan teknologi dan *Force Structure* (Struktur Kekuatan) jumlah alutsista dan satuan operasional, merupakan pertimbangan yang penting dalam pembangunan kekuatan TNI:

- 1) **Pembangunan kekuatan TNI AD.** Pembangunan kekuatan atau Postur TNI AD masih dalam rangka terwujudnya Postur sesuai MEF yang sudah berjalan dan saat ini di Renstra III tahun 2020-2024. Namun mulai diupayakan untuk mewujudkan kemampuan yang

melampaui kekuatan pertahanan minimal, selanjutnya terus ditingkatkan agar memiliki efek penangkal. Beberapa informasi tentang pembangunan kekuatan TNI AD saat ini serta yang secara khusus terkait dengan Pembangunan kekuatan TNI AD di wilayah Natuna sebagai antisipasi konflik militer di Laut China Selatan adalah memprioritaskan pembangunan satuan yang tergelar sebagai bagian dari STT Natuna yakni Yonkomposit I/Gardapati melalui pemenuhan personel, sarana prasarana dan pembangunan fasilitas guna mendukung pelaksanaan tugas Satuan tersebut. Selain itu, TNI AD juga meningkatkan kekuatan Yonkomposit I/Gardapati melalui pengadaan Alutsista strategis yang didukung teknologi tinggi.

- 2) **Pembangunan kekuatan TNI AL.** Pembangunan kekuatan TNI AL masih konsisten merujuk pada perencanaan Postur TNI AL tahun 2005-2024 yang mencakup peningkatan kekuatan, kemampuan dan pola gelar yang pada hakikatnya diorientasikan kepada pencapaian tugas-tugas TNI AL dalam rangka menunjang kepentingan nasional. TNI AL berupaya membangun kekuatan yang *World Class Navy* yang sangat dipengaruhi dengan keunggulan alutsista KRI kombatan. Namun kemampuan pengadaan baru dari luar negeri sangat terbatas sedangkan dari dalam negeri belum mampu memenuhi standar. Di sisi lain banyaknya tugas yang bersifat OMSP, menghadapi ancaman non militer menjadikan prioritas pengadaan alutsista TNI AL lebih kepada kapal-kapal pendukung (LST, LPD, BCM dan kapal patroli) yang dibuat industri pertahanan dalam negeri. Begitu pula unsur SSAT lainnya belum ideal sesuai kebutuhan TNI AL. Untuk pengamanan Laut Natuna Utara dan untuk mencegah Operasi Amfibi musuh, TNI AL belum memiliki kesatuan maupun alutsista untuk pertahanan pantai (*coastal defence*) yang dapat secara efektif menyerang kapal-kapal dalam Satgas Laut musuh.
- 3) **Pembangunan kekuatan TNI AU.** Pembangunan kekuatan TNI AU diarahkan untuk terwujudnya kekuatan TNI AU yang mampu menghadapi ancaman dan menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah NKRI, yang terdiri dari Alutsista TNI AU yang menerapkan teknologi mutakhir dan mampu beroperasi secara interoperabel didukung Organisasi TNI AU dinamis dan efisien. Pembangunan kekuatan TNI AU saat ini adalah pada Renstra III tahun 2020-2024, jika dilihat dinamika lingkungan strategis yang berimplikasi pada peningkatan ancaman, TNI AU harus memprioritaskan antisipasi terhadap ancaman militer sehingga TNI AU memerlukan pesawat *interceptor* yang tidak sesuai dengan MEF. Kesiapan alutsista rata-rata kurang dari 50% sehingga jauh dari efektif

dan efisien dalam gelar operasi untuk kepentingan pengamanan Laut Natuna Utara dan terlebih untuk mengantisipasi potensi *spill over* konflik militer di Laut China Selatan.

b. Pembinaan kemampuan TNI dalam pengamanan Laut Natuna Utara.

Berdasarkan teori *Command of the Sea* Sir Julian S. Corbett bahwa kemampuan penguasaan laut pada ruang dan waktu tertentu untuk bergerak melintasi laut tanpa gangguan atau perlawanan yang berarti dan kemampuan untuk mencegah lawan melakukan serangan. Demikian pula berdasarkan teori *Command of the Sea* Milan Vego bahwa keberhasilan pengendalian laut ditentukan melalui penguasaan teori Angkatan Laut, latihan, kerja sama, superioritas informasi, komando dan kendali, serta pelaksanaan operasi yang efektif dan itu semua merupakan langkah penting dalam pembinaan kemampuan TNI, dimana kondisi saat ini adalah sebagai berikut:

- 1) **Kemampuan Intelejen.** Ketiga matra TNI masih beroperasi secara mandiri dengan cara mengoptimalkan organisasi Pusat Sandi dan Siber masing-masing Angkatan dan mengembangkan kemampuan Satuan Sandi kotama sebagai perpanjangan tangan. Hasil yang dicapai juga belum digunakan untuk gelar operasi intelijen tempur gabungan. Kondisi ini sebagai dampak keterbatasan alat peralatan, fasilitas, SDM dan latihan.
- 2) **Kemampuan Pertahanan.** Pembinaan kemampuan TNI AD diprioritaskan pada Kemampuan Tempur untuk mewujudkan keterpaduan antar kecabangan dan mewujudkan kemampuan manuver darat terintegrasi, serta mewujudkan kemampuan menembak akurasi dan presisi tinggi. Namun keterbatasan alutsista dan kondisi geografis Kepulauan Natuna menjadikan kemampuan pertahanan kurang optimal. Di sisi lain Pembinaan kemampuan pertahanan TNI AL difokuskan pada kemampuan Peperangan Anti Kapal Atas Air, Peperangan Anti Kapal Selam, Peperangan Amfibi, Peperangan Elektronika, Angkatan Laut Militer dan peperangan khusus anti teror aspek laut. Namun demikian faktor keterbatasan kesiapan alutsista dan kurangnya latihan menjadikan kemampuan yang terbatas. Demikian juga dengan pembinaan kemampuan Pertahanan TNI AU yang saat ini masih terbatas pada pemberdayaan wilayah pertahanan satuan Lanud Raden Sadjad dan Satrad 212.
- 3) **Kemampuan Keamanan.** Memiliki kemampuan penegakan hukum di laut (gakkumla) dan kemampuan membantu upaya keamanan dalam negeri (kamdagri). Pada Gakkumla, pembinaan kemampuan diberikan kepada satuan-satuan udara yang melaksanakan pengawasan dari udara terhadap aktifitas di laut selanjutnya mengolah

hasil pengamatan menjadi data intelijen, dan kepada satuan-satuan kapal yang melaksanakan penegakan hukum berdasarkan data intelijen baik dari darat (radar), dari laut (kapal sendiri atau kapal lain) atau dari udara (pesawat TNI AU atau Patmar TNI AL).

- 4) **Kemampuan Dukungan.** Kemampuan dukungan oleh Pangkalan terhadap satuan-satuan operasional TNI di Natuna masih sangat terbatas. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya Depo Logistik, termasuk khususnya Tanki Timbun bahan bakar untuk menyediakan B-0 bagi kapal-kapal TNI AL yang beroperasi di perairan Natuna sedangkan Pertamina tidak menyediakan B-0 di Natuna sehingga kapal-kapal TNI AL jika akan melaksanakan pembekalan ulang bahan bakar harus kembali ke Tanjung Uban atau Batam. Disamping itu di Natuna juga tidak tersedia Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan) baik untuk kapal perang maupun untuk pesawat udara. Hal ini juga mendasari pengerahan satuan operasional TNI khususnya alutsiata TNI AL dan TNI AU ke Natuna hanya bersifat penugasan sementara dalam Satuan Tugas Operasi.

c. **Gelar kekuatan TNI di wilayah Natuna.**

Berdasarkan teori *Sea Power Alfred Thayer Mahan* bahwa kemakmuran dan kekuatan suatu negara tergantung pada “pengendalian jalur laut internasional” yang ditentukan 6 unsur utama yang mempengaruhi *sea power* negara tersebut, diantaranya Posisi Geografis dan Konformasi Fisik, dimana Kepulauan Natuna terdiri dari ratusan pulau-pulau kecil di tengah laut yang sangat luas dan secara geografis merupakan wilayah terdepan dan berhadapan langsung dengan sumber ancaman kedaulatan wilayah NKRI yakni konflik Laut China Selatan, sehingga TNI telah mengambil langkah-langkah antisipasi melalui penggelaran kekuatan TNI di wilayah tersebut.

- 1) **Gelar kekuatan TNI AD.** Kondisi gelar kekuatan permanen TNI AD di wilayah Natuna termasuk satuan yang membawahi atau bertanggung jawab terhadap keamanan dan pertahanan wilayah Natuna saat ini adalah sebagai berikut: Kodam I/Bukit Barisan, Komando Resort Militer (Korem) 033/Wira Pratama, Komando Distrik Militer (Kodim) 0318 Natuna, Batalyon Komposit 1/Gardapati (BK 1/GP)
- 2) **Gelar kekuatan TNI AL.** Kondisi gelar kekuatan permanen TNI AL di wilayah Natuna termasuk satuan yang membawahi atau bertanggung jawab terhadap keamanan dan pertahanan wilayah Natuna saat ini adalah sebagai berikut: Komando Armada I, Lantamal IV/Batam, Lanal Ranai, Lanal Tarempa, Lanudal Matak,

Lanudal Tanjungpinang, Wing Udara 2 Puspenerbal, Kompi Komposit Marinir disiapkan untuk penyelenggaraan Operasi Amfibi dan Operasi Pertahanan Pantai.

- 3) **Gelar kekuatan TNI AU.** Kondisi gelar kekuatan permanen TNI AU di wilayah Natuna termasuk satuan yang membawahi atau bertanggung jawab terhadap keamanan dan pertahanan di wilayah Natuna saat ini adalah sebagai berikut: Komando Operasi Angkatan Udara (Koopsau) I, Pangkalan Udara (Lanud) Raden Sadjad, Satrad 212
- 4) **Satuan TNI Terintegrasi (STT) Natuna.** STT Natuna mengintegrasikan satuan-satuan operasional dari ketiga matra TNI yakni dari TNI AD meliputi Batalyon Komposit yang diperkuat oleh Kompi Zeni Tempur, Baterai Rudal Arhanud dan Baterai Armed, dari TNI AL meliputi Lanal Ranai dan Kompi Komposit Marinir didukung faslabuh Selat Lampa dan Sabang Mawang untuk mendukung operasional Kapal Perang TNI AL, yang beroperasi disekitar perairan Natuna, dan dari TNI AU terdiri atas Lanud Raden Sadjad beserta fasilitas pendukungnya Hanggar Integratif dan Hanggar Skuadron *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) serta Satrad 212 Natuna untuk mendukung operasional Pesawat Udara TNI. Namun demikian hingga saat ini operasional “satuan terintegrasi” masih belum terwujud mengingat fasilitas pendukung seperti sarana Kodal belum ada dan masih terhambat oleh masalah pengawakan organisasi dan keterbatasan fasilitas pangkalan dan belum ada penambahan perkuatan satuan dari ketiga matra sejak STT ini diresmikan.
- 5) **Kogabwilhan I.** Kogabwilhan I saat ini masih dalam tahap pembangunan Markas Komando di Dompok, Tanjung Pinang dan pemenuhan pengawakan organisasi. Untuk Kantor Mako saat ini, Kogabwilhan I masih menggunakan (pinjam pakai) gedung milik Korem 033/Wira Pratama sedang untuk *messing* pejabat utama dan personel staf, Kogabwilhan I masih menggunakan Rumah Jabatan dan Mess milik Lantamal IV/Tanjung Pinang dan Mess milik Lanud Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang.

d. Penggunaan kekuatan TNI dalam operasi militer selain perang di Laut Natuna Utara.

Penggunaan kekuatan TNI saat ini diwujudkan dalam berbagai bentuk gelar operasi yang dilaksanakan oleh ketiga matra Angkatan dalam rangka menjaga keamanan dan menegakkan kedaulatan di seluruh wilayah NKRI, termasuk di perairan Natuna dan sekitarnya. Gelar operasi pengamanan Laut Natuna Utara hingga ZEE Indonesia di Laut China Selatan sangat penting,

salah satunya karena di perairan tersebut terdapat ALKI-I yang merupakan jalur laut internasional serta berbagai kepentingan nasional Indonesia. Sebagaimana **Teori Sea Power Alfred Thayer Mahan** bahwa kekuatan negara tergantung pada pengendalian jalur laut internasional dan pengamanan kepentingannya di laut. Hal ini diperkuat dengan **Teori Sea Control Geoffrey Till** bahwa untuk pengembangan teknologi Angkatan Laut dalam rangka pengendalian laut dibutuhkan pesawat terbang (*aircraft*) *early warning* untuk pelaksanaan pengawasan atau dengan kata lain pentingnya operasi laut mendapat dukungan operasi udara.

Demikian pula **Teori Air Power Bernard Law Montgomery** mengatakan bahwa tugas utama Angkatan Udara adalah untuk mengalahkan kekuatan udara musuh sehingga operasi pasukan kawan di laut, di darat dan di udara dapat terlaksana tanpa hambatan. Konsep pentingnya operasi militer gabungan tersebut sejak dulu sudah disadari berbagai negara dan hingga kini masih menjadi opsi paling efektif dalam penyelenggaraan operasi militer. Namun demikian, hal tersebut belum diberlakukan oleh TNI dalam gelar operasi pengamanan Laut Natuna Utara dimana dari dulu hingga kini, gelar operasi dilaksanakan sendiri-sendiri oleh masing-masing matra Angkatan. Sebagai gambaran penggunaan kekuatan TNI dalam gelar operasi di wilayah Natuna saat ini adalah sebagai berikut:

- 1) **Gelar Operasi TNI AD.** Dalam pengamanan wilayah di Kepulauan Natuna, TNI AD melalui Kodam I/Bukit Barisan selaku Kotama Ops melaksanakan operasi sebagai berikut: Operasi pengamanan perbatasan (Opस्पamtas) RI-Laut China, Operasi pengamanan Pulau Terluar (Opस्पam Puter) di Pulau Sekatung.
- 2) **Gelar Operasi TNI AL.** TNI AL menggelar operasi pengamanan wilayah perairan Natuna termasuk Laut Natuna Utara hingga batas terluar ZEE Indonesia yang masih belum tuntas dengan ZEE Vietnam dan ZEE Malaysia, bahkan sebagian beririsan dengan klaim *Nine dash Line* China. Berikut merupakan penggunaan kekuatan TNI dalam OMSP di Laut Natuna Utara oleh Kotama Ops TNI AL: Operasi Siaga Tempur Laut (Ops Siaga Purla), Operasi Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia-I (Opस्पam ALKI-I), Operasi Keamanan Laut (Opस्पamkla) dalam rangka penegakan hukum di laut di seluruh wilayah kerja Koarmada I.
- 3) **Gelar Operasi TNI AU.** Sebagai bentuk penggunaan kekuatan udara dalam pengamanan wilayah Natuna, TNI AU melalui Kotama Opsnya Koopsau I menggelar operasi sesuai area yang juga mencakup seluruh Laut Natuna Utara hingga batas ZEE Indonesia, dengan periode waktu dan dukungan logistik yang

sudah ditentukan oleh Mabes TNI. oleh mabes TNI. Adapun gelar operasi TNI AU di wilayah Natuna hingga perbatasan ZEEI dengan LCS terdiri atas: Operasi Pertahanan Udara, Operasi Pertahanan Udara Pasif, Operasi Pertahanan Perbatasan Udara Indonesia-Malaysia, Operasi Patroli Udara, Operasi Angkutan Udara, Operasi Pengamatan dan Pengintaian Udara, Operasi Pengamanan ALKI-I.

Saat ini penggunaan kekuatan TNI dalam OMSP di Laut China Selatan masih bersifat sektoral dimana masing-masing matra angkatan menggelar operasinya sendiri dan tidak terintegrasi dengan matra lainnya. Penggunaan kekuatan TNI dalam operasi pengamanan Laut Natuna Utara juga tidak bekerjasama dengan kementerian/lembaga yang juga menggelar operasi penegakan hukum di wilayah yang sama, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Kepolisian Perairan (Polair) Polda Kepri.

e. Diplomasi militer dalam rangka menjaga stabilitas keamanan kawasan.

Berdasarkan **Teori Diplomasi Erik Pajtinka** bahwa secara umum diplomasi militer merupakan serangkaian aktifitas atau program kebijakan luar negeri yang damai (*non-violent foreign-policy*), yang diarahkan pada penyelesaian konflik bersenjata serta pencegahan perang didasari penggunaan negosiasi dan instrumen diplomasi lainnya. Sejalan dengan **Teori Diplomasi Erik Pajtinka** tersebut, kebijakan luar negeri Indonesia mengedepankan diplomasi perdamaian dalam setiap penyelesaian konflik. Demikian pula diplomasi militer TNI yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan luar negeri Indonesia, sehingga TNI selalu menjadikan diplomasi militer sebagai strategi utama dalam menjalin hubungan dengan militer negara-negara sekitar, maupun dengan militer negara-negara yang memiliki kepentingan di kawasan.

Berkenaan dengan konflik Laut China Selatan, TNI juga memanfaatkan diplomasi militer melalui berbagai bentuk kerjasama baik secara bilateral, trilateral maupun multilateral sehingga potensi konflik dapat diredam dan stabilitas keamanan kawasan tetap terpelihara. Terkait seperti apa dan sejauh mana diplomasi militer TNI dalam rangka menjaga stabilitas keamanan kawasan, berikut penjelasan Paban V/Kerkamtas Sops TNI, Kolonel Laut (P) Askari, P.S.C., S.Ikom., M.Sc., M.A. yang sekaligus merupakan gambaran kondisi diplomasi militer TNI saat ini.

- 1) Diplomasi Militer TNI.** Diplomasi militer TNI diselenggarakan oleh Pusat Kerjasama Internasional (Puskersin) TNI dan Staf Operasi Panglima TNI melalui kerja sama di berbagai bidang dengan Angkatan Bersenjata negara lain, diantaranya

melalui Pertemuan atau Dialog (*Meeting*), Pendidikan dan Pelatihan (*Education and Training*), Latihan Bersama (*Joint Exercises*), Operasi Bersama (*Joint Operations*), Kunjungan Persahabatan (*Visits*), Diskusi (*Seminar, Symposium, Focus Group Discussion*) dan lain-lain.

2) Diplomasi Militer TNI AD.

- a) Kerja sama dilaksanakan dalam forum ASEAN *Chief of Army Multilateral Meeting* (ACAMM) dalam bentuk kerja sama *Army to Army Talk*, ASEAN *Armies Rifles Meeting* (AARM), *Army Interaction Games* (AIG), Kerjasama dalam bidang Intelijen dalam forum *Subject Matter Expert Exchange* (SMEE), serta Kerja sama dalam bidang pendidikan.
- b) Diplomasi militer TNI AD juga dilaksanakan dalam bentuk Latihan Bersama (Latma) dengan negara-negara ASEAN dan negara-negara sahabat lainnya.
- c) TNI AD juga menggelar operasi pengamanan perbatasan (Pamtas) darat yakni Opspamtas Malindo, di sepanjang perbatasan darat Malaysia-Indonesia di Pulau Kalimantan.

3) Diplomasi Militer TNI AL.

- a) Kerja sama dilaksanakan dalam forum ASEAN *Navy Chief's Meeting* (ANCM) dalam bentuk kerjasama antara lain *Navy to Navy Cooperation Meeting* (NTNCM), *Navy to Navy Talk* (NTNT), Seminar, pelatihan, workshop dan *exchange program*, serta bidang pendidikan.
- b) Kerjasama multilateral atau regional di kawasan yang rutin dilaksanakan TNI AL antara lain *Western Pacific Naval Symposium* (WPNS), *Indian Ocean Naval Symposium* (IONS), *Asia Pacific Submarine Conference* (APSC), serta dengan menyelenggarakan atau mengikuti Latma Multilateral, antara lain *Multilateral Naval Exercise Komodo* di Indonesia, *Rim of Pacific* (Rimpac) di Amerika, *Kakadu* di Australia, *Cobra Gold* di Thailand dan *Milan* di India.
- c) Bentuk diplomasi militer lainnya oleh TNI AL adalah Operasi Muhibah (*Port Visit*) seperti Pelayaran keliling dunia Kartika Jala Krida (KJK) Taruna AAL menggunakan Kapal Latih KRI Bima Suci yang merupakan pengganti KRI Dewaruci yang sudah tua. *Port Visit* juga merupakan program 2 tahunan TNI AL yakni kunjungan kapal perang ke negara-negara di kawasan (negara-negara ASEAN, Asia Timur Jauh, Australia, hingga negara-negara Pasifik).

-
- d) Diplomasi militer TNI AL juga dilaksanakan dalam bentuk Operasi Bersama, seperti Patroli Terkoordinasi (Patkor) di sekitar perbatasan, antara lain Patkor Malindo (Malaysia-Indonesia), Patkor Indosin (Indonesia-Singapura), Patkor Indindo (India-Indonesia), Patkor Ausindo (Australia-Indonesia), Patkor Philindo (Philipina-Indonesia), Patkor Indothai (Indonesia-Thailand), Patkor Malsindo (Malaysia-Singapura-Indonesia) dan Patkor Indomalphi (Indonesia-Malaysia-Philipina), serta Patkor *Malacca Straits Sea Patrol* (MSSP) dan Patkor *Eyes in the Sky* (EiS) yang merupakan kerjasama pengamanan Selat Malaka oleh Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Namun demikian, Indonesia belum memiliki Patkor dengan Vietnam meski benturan di Laut Natuna Utara sering terjadi.
- e) Disamping itu, diplomasi militer TNI AL juga diwujudkan dengan berpartisipasi pada Operasi Perdamaian Dunia dengan mengirim kapal perang bergabung dengan misi-misi PBB seperti UNIFIL di Lebanon.

4) Diplomasi militer TNI AU.

Kerja sama dilaksanakan dalam forum ASEAN *Air Force Chief's Conference* (AAFC) dalam bentuk kerja sama *Airman to Airman Talks* (ATAT), *Intelligence Exchange*, Kerja sama dalam bidang pendidikan, serta ASEAN *Air Chiefs Conference* (AACC) yaitu forum pertemuan antar Kepala Staf Angkatan Udara negara-negara ASEAN.

4.3 Strategi Pengamanan yang harus dilakukan TNI dalam menghadapi potensi konflik militer di Laut China Selatan.

Secara teoritis, strategi TNI yang diharapkan adalah strategi yang ideal (menjawab ancaman), komprehensif (mencakup berbagai bidang terkait) yang efektif dan efisien dalam mengamankan Laut Natuna Utara. Ancaman faktual Laut Natuna Utara adalah pelanggaran hukum atau *transnational crimes* di dan lewat laut serta pelanggaran wilayah NKRI oleh kapal-kapal asing, serta ancaman potensal yaitu *spill over* konflik militer di Laut China selatan. Meskipun TNI sudah menggelar operasi patroli rutin dan menggelar satuan-satuan di Kepulauan Natuna, namun kegiatan *transnational crimes* seperti *illegal fishing* oleh KIA Vietnam dan China dan pelanggaran wilayah oleh kapal-kapal pemerintah (Kelautan/Perikanan, Penjaga Pantai hingga Angkatan Laut) masih terus terjadi. Ini merupakan indikator kuat bahwa strategi TNI dalam pengamanan Laut Natuna Utara yang mencakup 5 aspek utama yaitu pembangunan

kekuatan, pembinaan kemampuan, gelar kekuatan, penggunaan kekuatan dan diplomasi militer, tidak efektif sehingga perlu dievaluasi dan dioptimalisasi. Saat ini sesuai Teori Strategi yang dikemukakan Arthur Lykke bahwa dalam mencapai suatu tujuan (*Ends*) digunakan cara (*Ways*) yang tepat, dengan sumber daya (*Means*) yang memadai.

Pembangunan Kekuatan TNI. Henry C. Bartlett berpendapat bahwa kemampuan tempur ditentukan oleh “Kesiapan” dari personel, latihan, alutsista dan pemeliharaan. Hal ini berarti bahwa untuk Renbangkuat TNI, agar mampu melaksanakan tugasnya harus dengan membangun kesiapan personel atau pasukan, menyiapkan pelatihannya, memenuhi alutsistanya dan menyiapkan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan (Fasharkan)nya. Henry C. Bartlett juga berpendapat bahwa kemampuan tempur ditentukan oleh “ketahananlamaan” gelar operasi yang dipengaruhi oleh ketersediaan alutsista pengganti dukungan logistik seperti amonisi, suku cadang, bahan bakar, perbekalan dan lain lain, yang memungkinkan militer tetap kuat bertempur untuk waktu yang lama atau perang berlarut. Hal ini berarti Renbangkuat TNIpun tidak boleh mengabaikan pembangunan depo-depo logistik operasi termasuk penempatan dan jalur distribusinya. Lebih lanjut Henry C. Bartlett berpendapat bahwa kemampuan tempur juga ditentukan oleh “tingkat modernisasi” alutsista yang digunakan pasukan. Maka dalam Renbangkuat TNI melalui pengadaan baru maupun modernisasi alutsista yang sudah ada, harus memperhatikan kemampuan (terkait dengan fungsi asasnya) yang harus *highly capable*, dan harus memperhatikan teknologinya (terkait data teknisnya) yang harus *technically superior*. Demikian juga Henry C. Bartlett berpendapat bahwa kemampuan tempur sangat ditentukan oleh Struktur Pertahanan yang meliputi jumlah dan komposisi satuan dalam Angkatan Bersenjata terutama satuan tempur. Ini artinya bahwa Renbangkuat TNI harus mengacu pada Postur Pertahanan ideal yang sangat dipengaruhi khususnya oleh kekuatan (jumlah dan komposisi) satuan operasional seperti wing/ skuadron udara (TNI AU), batalyon (TNI AD) dan kapal perang (TNI AL).

Teori Force Planning Approaches dari Henry C. Bartlett tersebut sangat relevan untuk digunakan dalam merumuskan perencanaan pembangunan kekuatan TNI dengan mempertimbangkan keempat aspek yakni *Readiness*, *Sustainability*, *Modernization* dan *Force Structure* dimana pembangunan kekuatan TNI akan menghasilkan *total combat capability* yakni kemampuan tempur yang akan dapat pula secara efektif dan efisien mendukung strategi TNI dalam pengamanan Laut Natuna Utara.

Dalam pembangunan kekuatan, posisi dan kondisi geografi merupakan faktor paling fundamental (Singh, Jodh., 1979) sehingga dalam pengadaan dan modernisasi alutsista harus

mempertimbangkan posisi dan kondisi geografi Natuna yang berbentuk kepulauan terletak jauh dari pulau-pulau besar Indonesia dan berbatasan dengan “*open sea*” Laut China Selatan. Untuk itu pengadaan alutsista diprioritaskan untuk pertahanan maritim, menghadapi ancaman dari laut dan udara.

5. Kesimpulan dan Saran

Ancaman keamanan di Laut China Selatan yang bersifat militer dan nir militer secara signifikan memengaruhi kebijakan pertahanan Indonesia, terutama dalam kampanye militer di Laut Natuna Utara. Ancaman militer berupa potensi perang terbuka akibat agresivitas negara yang terlibat sengketa di Laut China Selatan menuntut adanya kesiapan strategi panjang yang mampu mengantisipasi konflik yang dapat berdampak langsung pada kedaulatan wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Natuna yang berdekatan. Ancaman nir militer seperti illegal fishing, illegal mining, narkotrafik, dan pelanggaran wilayah semakin menambah kompleksitas tantangan keamanan. Kondisi ini mengharuskan kebijakan pertahanan Indonesia untuk lebih adaptif dan komprehensif, mengintegrasikan operasi militer dan non-militer secara berkesinambungan agar dapat menjaga stabilitas, kedaulatan, dan keamanan nasional di tengah dinamika konflik di kawasan tersebut.

TNI dapat memaksimalkan peran strategis Kepulauan Natuna dengan mengoptimalkan gelar kekuatan permanen yang telah ada, yaitu kekuatan TNI AD, AL, AU, dan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Kogabwilhan I). Penggelaran kekuatan lintas matra ini memungkinkan sinergi operasional yang lebih efektif dan efisien dalam mengamankan wilayah Natuna dan sekitarnya. Dengan memanfaatkan posisi geografis Natuna sebagai pangkalan terdepan, TNI mampu meningkatkan kesiapan dan respons terhadap pelbagai ancaman keamanan, baik militer maupun nir militer. Optimasi gelar kekuatan juga memperkuat kemampuan deterrence serta memberikan landasan operasional yang solid untuk pengamanan perbatasan laut dan udara Indonesia di wilayah yang sangat rawan konflik tersebut.

Merujuk pada Teori Strategi Arthur Lykke, strategi pengamanan yang efektif harus mengharmonisasikan tujuan (ends), cara (ways), dan sumber daya (means) secara seimbang. Dalam menghadapi potensi konflik di Laut China Selatan, pembangunan kekuatan TNI harus berorientasi pada ancaman spesifik dan karakteristik geografis wilayah kepulauan dengan perairan luas. Pembangunan tersebut meliputi peningkatan kapabilitas TNI AD di darat, TNI AL di laut, dan TNI AU di udara, menyesuaikan dengan kebutuhan pertahanan dan pengamanan wilayah. Selain itu, pembinaan kemampuan harus mengedepankan koordinasi operasi gabungan

antar matra, khususnya dalam operasi laut dan udara guna meningkatkan efektivitas respons terhadap berbagai bentuk ancaman. Pendekatan ini memastikan kesiapan TNI dalam mengamankan kedaulatan Indonesia secara komprehensif dan adaptif.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdoellah, Oekan S., 2016. *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: di Persimpangan Jalan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Arikunto, S. 2010. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arhur, Lykke. 1993. *Military Strategy: Theory and Application*, Pennsylvania: US Army War College
- Amalia, F. S., Mahroza, J., Halkis, M., Priyanto, P., Purwanto, S., Gunawan, R., ... & David, L. (2024). *DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA-AUSTRALIA UNTUK HUMANITARIAN ASSISTANCE AND DISASTER RELIEF (HADR)*.
- A. Irawan J. H dan Giandi Kartasasmita, 2015. *Diplomasi Komersial Indonesia ke Belanda Masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2014*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Katolik Parahyangan.
- Bermana, S., Prakoso, L. Y., Patmi, S., Al-Mujaddid, T. F., Habibie, S. Y., Susmoro, H., ... & Gunawan, R. (2025). *UNDERWATER SURVEILLANCE PERTAHANAN LAUT INDONESIA*
- Bajari, Atwar. 2015. *Metode Penelitian Komunikasi: Prosedur, Tren dan Etika* Jakarta: Simbiosis Rekatama Media.
- Cable, James., 1981. *Gunboat Diplomacy 1919-1979: Political Applications of Limited Naval Force*. St. Martin's Press, New York.
- Daniel Moran and James A. Russel. 2016. *Maritime Strategy and Global Order*, Washington DC: Georgetown University Press.
- Fishman, Ted C., 2005. *China Inc.: How the Rise of the next Superpower Challenges America and the World*. Simon & Schuster Publisher.
- Geoffrey Till. 2004. *Sea Power, A Guide for Twenty-First Century*, London: Frank Class Publisher.
- Hanifahturahmi, 2020. *Komunikasi Internasional Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Sengketa Laut Cina Selatan di Natuna Utara*, Jurnal Dinamika Pemerintahan. Vol. 3, No. 2.
- Hayton, B. 2014. *The South China Sea: the struggle for power in Asia*. Yale University Press.

-
- Jeffrey G. Lofgren, 2002. 21st Century Air Power Theorists: *Who Has It Right John Warden or Robert Pape?*, National Defense University, National War College.
- Julian S. Corbett. 1911. *Some Principle of Maritime Strategy* (Longmans, Green and Co, London and New York).
- Kaplan, Robert D., 2014. *Asia's Cauldron: the South China Sea and the End of a Stable Pacific*. Random House LLC, New York.
- Khanna, Parag., 2008. *The Second World: How Emerging Power are Redefining Global Cpmpetition in the Twenty-First Century*. The Penguin Group, london, England.
- Lai, Benjamin. 2016. *The Dragon'teeht: the Chinese People's Liberation Army-Its History, Tradition, and Air, Sea and Land Capabilities in the 21st Century*: Casemate Publishers, Havertown USA and Oxford UK`
- Mahan, A.T., 1987. *The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783*, New York: Dover Publications
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Source book*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Milan N. Vego, 2016. *Maritime Strategy and Sea Control: Theory and Practice*, London: Routledge.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya.
- Parker, R. D. 2003. *Mahan for the twenty first century: His principles still apply to national power*. Marine Corps Command And Staff College Quantico Va.
- Purwanto, S., Supangat, S., Esterina, M., Souhoka, S., Chandra, F., & Hariputra, A. & Arianto, T.(2024). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah*.
- Reed, D. (Ed.). 2014. *In Pursuit of Prosperity: US Foreign Policy in an Era of Natural Resource Scarcity*. Routledge.
- Robert, C. Rubel, 2014. *Joint Strategic and Operational Planning Smart Book*, Lakeland: The Lightning Press.
- Santacroce, 2012. *Command of the Sea - An Old Concept Resurfaces in a New Form* Naval War College Review, Autumn.
- Sigit Purwanto, S. I. P. (2024). *Definisi Dan Konsep. Manajemen Sumber Daya Manusia, 1*.
- Singh, Jodh., 1987. *Defence Studies: National and Civil Defence and Military Law*. Surjeet Publications, New Delhi.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Jakarta : Alfabeta

JURNAL

- Fajri, M. B. (2020). Strategi Pertahanan Maritim Indonesia di Tengah Dinamika Perang Hibrida Kawasan Laut China Selatan. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(1), 59-78.
- Godfrey, Jack E. (1969) "Mahan: The Man, His Writings and Philosophy," *Naval War College Review*: Vol. 22 : No. 3 , Article 6. Hlm. 64
- Ginting, R. (2018). Perilaku Militer China di Laut China Selatan dan Pengaruhnya Terhadap Kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna (Periode 2016-2017).
- Pambudi, A. W. (2019). Analisa Respon Indonesia Terhadap Aktivitas Militerisasi Tiongkok di Laut China Selatan Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014-2019. *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(2), 89-104.
- Purwanto, S., Hidayatullah, S. S. W., & Tirtoadisuryo, D. *HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT STRATEGIES FOR ENHANCING ORGANIZATIONAL PERFORMANCE IN THE DIGITAL ERA*.
- Purwanto, S., Purnomo, M. R., & Budiman, H. (2025). *POWER DYNAMICS IN DECISION MAKING: A QUALITATIVE ANALYSIS*. *POWER*, 2(1), 80-86.
- Riyanto, S. (2012). Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(3).
- Wahyudi, A. H. (2016). Peran dan Strategi Indonesia bersama ASEAN Dalam Upaya Meredakan Konflik Laut China Selatan [The Role and Strategy of Indonesia with ASEAN to Reduce Conflict in the South China Sea]. *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)*, 8(16), 17-30.
- Murniningtyas, Endah (2016). Ringkasan Prakarsa Strategis: Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Kelautan Menuju Terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (Jakarta: Bappenas), hlm. 1
- Rachman, Handewi P.S. dan Suryani, Erma. (2010), *Forum Penelitian Agri Ekonomi*, Volume 28 No. 2, Desember 2010, hlm. 107-121

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor: 37 tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Postur Pertahanan Negara 2015, (Jakarta: Kemhan, 2015), hlm. 8
- Kep Panglima TNI No: Kep/1312/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Pembangunan Prioritas Pulau Terluar Tertentu dan Daerah yang Bersifat Strategis.



CENTURION

MANAGEMENT, SOCIAL, POLITIC & DEFENSE JOURNAL

<https://jurnal.patriotbangsapublisher.com>

ISSN XXXX-XXXX
VOL 1, NO 1
AGUSTUS 2025

Kep Panglima TNI No: Kep/1124/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Konsep Umum Operasional Komando gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan).

Kebijakan penyesuaian Minimum Essential Force Komponen Utama, Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 19 tahun 2012, hlm. 5